Strategi Penurunan Disparitas Pembangunan Wilayah Pesisir Selatan Jawa Barat

Strategy for Decreasing the development Disparity in the Southern Coast of West Java

¹Mita Yuliantika, ²Asnita Frida Sebayang, ³Ria Haryatiningsih

^{1,2}*Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹m.yuliantika@yahoo.com, ²fridaasnita@gmail.com ³ria.haryatiningsih@gmail.com

Abstract. Inequality in regional development is a common problem that occurs in the economic activities of a region. This inequality is basically caused by differences in several factors in each region. As a result of this difference, the ability of an area to encourage the development process of a region is different. The southern coastal region of West Java is an area that is often juxtaposed with inequality. Inequality that occurs between and within the southern coastal areas of West Java can be seen from the value of GDP per capita, which averages the southern coastal region far below the average area of West Java Province. The analytical method used in this study is descriptive quantitative research aimed to determine the condition of inequality between and within the southern coastal region of West Java and develop a strategy to reduce development disparity in the southern region of West Java. The data analysis technique in this study to measure inequality is to use Theil Entropy Index and determine strategies with SWOT analysis.

Keywords: Regional Inequality, South Coast, Strategy.

Abstrak. Ketimpangan pembangunan wilayah merupakan masalah umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan beberapa faktor yang terdapat pada masing-masing daerah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan suatu daerah menjadi berbeda. Wilayah pesisir selatan Jawa Barat merupakan wilayah yang kerap disandingkan dengan ketimpangan. Ketimpangan yang terjadi antar dan dalam di wilayah pesisir selatan Jawa Barat dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang rata-rata wilayah pesisir selatan jauh berada di bawah wilayah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif penelitian bertujuan untuk mengetahui kondisi ketimpangan antar dan dalam di dalam wilayah pesisir selatan Jawa Barat dan menyusun strategi penurunan disparitas pembangunan di wilayah pesisir selatan Jawa Barat. Teknik analisis data dalam penelitian ini untuk mengukur ketimpangan adalah menggunakan Indeks Entropy Theil dan menentukan strategi dengan analisis SWOT.

Kata Kunci: Ketimpangan Wilayah, Pesisir Selatan, Strategi

A. Pendahuluan

Pada dasarnya dalam proses pembangunan dapat ditemui permasalahan antara pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan berimbang. Permasalahan tersebut berasal dari dugaan bahwa dengan adanya pertumbuhan akan terjadi pemerataan, namun faktanya tidak. Pertumbuhan suatu wilayah tidak serta merta dapat menimbulkan pertumbuhan yang sama di daerah lainnya, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah (*regional disparity*) merupakan fenomena umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan wilayah tersebut terlihat dengan adanya wilayah yang mengalami pertumbuhan cepat, sementara beberapa wilayah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Hal ini diakrenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi (Ardiowati, 2017). Menurut (Sjafrizal, 2018) ketimpangan pembangunan wilayah terdiri dari beberapa faktor, antara lain: perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan alokasi dana perimbangan daerah. Wilayah pesisir selatan Jawa Barat merupakan wilayah belakang Jawa Barat yang kerap disandingkan dengan ketimpangan. Pemerintah Jawa Barat juga mengeluarkan Peraturan Daerah No 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Pesisir Selatan Jawa Barat. Dalam rangka mengoperasionalkan peraturan daerah No 28 tahun 2010 melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat menyusun Rencana Strategi Pengembangan Wilayah. Dasar

penyusunan Rencana Startegis pengembangan wilayah ini adalah berangkat dari adanya isu disparitas pembangunan wilayah pesisir utara dan selatan, perkembangan wilayah pesisir utara pembangunannya lebih maju dibandingkan dengan pesisir selatan. Dengan tersusunnya Rencana Strategis pengembangan wilayah pesisir selatan Jawa Barat sebagai bentuk operasional tindak lanjut Peraturan Daerah No 28 tahun 2010, hal ini merupakan bukti kepedulian dari Pemerintah Daerah Jawa Barat. Gejala disparitas ini dapat dilihat dari PDRB per kapita. PDRB per kapita pesisir selatah Jawa Barat rata-ratanya lebih rendah dari Provinsi Jawa barat

Tabel 1.1 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Wilayah Pesisir Selatan Tahun (2011-2016 (Juta Rupiah)

Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Sukabumi	12,53	13,19	13,92	14,67	15,31	16,09
Kab. Cianjur	9,35	9,78	10,28	10,76	11,3	11,98
Kab. Ciamis	9,52	9,73	10,4	10,78	11,33	16,12
Kab. Garut	10,92	11,21	11,64	12,09	12,52	13,15
Kab. Tasikmalaya	9,69	9,89	10,46	10,91	11,33	11,95
Kab Pangandaran	14,84	14,23	14,85	15,38	16,06	19,79
Rata-rata Pesisir Selatan	11,14	11,34	11,93	12,43	12,98	14,85
Rata-rata Provinsi Jawa Barat	21,88	21,83	23,87	24,89	25,84	26,96

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah, 2018)

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:”Bagaimana kondisi dispariatis pembangunan antar dan dalam di wilayah pesisira selatan Jawa Barat? dan Bagaimana strategi mengurangi disparitas pembangunan wilayah pesisir selatan?. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb:

1. Mengetahui kondisi ketimpangan antar dan dalam di dalam wilayah pesisir selatan Jawa Barat.
2. Menyusun strategi penurunan disparitas pembangunan di wilayah pesisir selatan Jawa Barat.

B. Landasan Teori

Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Lincoln, 2015).

Ketimpangan

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah (Sjafrizal, 2008).

Teori Kutub Pertumbuhan

Francois Perroux (1995) telah mengembangkan konsep kutub pertumbuhan. Ia menyatakan bahwa pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi di segala tata ruang, akan tetapi

hanya terbatas pada beberapa tempat tertentu dengan variabel-variabel yang berbeda intensitasnya. Tata ruang diidentifikasi sebagai suatu arena kekuatan yang di dalamnya terdapat kutub-kutub atau pusat-pusat.

Setiap kutub mempunyai kekuatan pancaran pengembangan ke luar dan kekuatan tarikan ke dalam. Konsep tersebut menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan khususnya mengenai perusahaan dan industri-industri serta saling ketergantungan, dan bukan mengenai pola geografis kegiatan ekonomi atau implikasi geografis pertumbuhan ekonomi dan pergeseran industri secara intra dan inter. Konsep ini diintroduksikan sebagai alat untuk menyelidiki proses kegiatan-kegiatan ekonomi dimana perusahaan-perusahaan dan industri-industri muncul dan berkembang atau mengalami stagnasi dan bahkan seringkali harus menghilang. Secara esensial, teori Perroux merupakan teori dinamis. Proses pertumbuhan ekonomi karena adanya kesuksesan atau keberhasilan kutub-kutub dinamis.

Pemikiran dasar dari konsep pertumbuhan adalah bahwa kegiatan ekonomi dalam suatu daerah cenderung beraglomerasi di sekitar sejumlah kecil pusat-pusat pertumbuhan. Arus polarisasi akan bergravitasi ke arah kutub pertumbuhan. Daerah di sekitar kutub pertumbuhan merupakan wilayah pengaruhnya atau wilayah pertumbuhannya (Adisasmita 2014).

Ukuran Ketimpangan

Salah satu indeks yang lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah *Theil Indeks*. Data yang digunakan dalam *Theil Indeks* ini sama halnya dengan data yang digunakan dalam indeks Williamson yaitu PDRB per kapita dan jumlah penduduk antar daerah. Demikian pula halnya dengan

penafsirannya yang juga sama yaitu bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila mendekati 0 berarti sangat merata. Formulasi *Theil Indeks* adalah sebagai berikut:

$$T_d = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left\{ \frac{y_{ij}}{Y} \right\} \log \left[\frac{y_i}{Y} / \frac{n_{ij}}{N} \right]$$

Dimana:

Y_{ij} = PDRB per kapita kabupaten i di provinsi j

Y = Jumlah PDRB per kapita seluruh provinsi j

N = Jumlah penduduk kabupaten i di provinsi j

N_{ij} = Jumlah penduduk seluruh Kabupaten

Menurut Sjafrizal (2018), penggunaan Indeks Theil sebagai ukuran ketimpangan ekonomi antarwilayah mempunyai kelebihan tertentu. Pertama, indeks ini dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas. Kedua, dengan menggunakan indeks ini dapat pula dihitung kontribusi masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan kebijakan yang cukup penting.

Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah salah satu jenis metode analisis data dengan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Menurut (Rangkuti, 2005) analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pembagian misi, tujuan, strategi

dan kebijakan dari para pengambil keputusan. Maka dari itu suatu perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis suatu wilayah (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Nilai indeks entropi theil yang semakin kecil pula atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau dengan kata lain semakin merata, dan bila semakin jauh dari nol atau lebih dari satu menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar atau sangat timpang.

Tabel 3 Hasil pengukuran Ketimpangan di Pesisir Selatan Jawa Barat

Tahun	Indeks Theil
2013	0,93
2014	0,93
2015	0,93
2016	0,92
Rata-rata	0,93

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan dalam data yang tersaji di atas hasil yang ditunjukkan oleh Indeks Entropi Theil, dari tahun ke tahun tidak menunjukkan terjadinya penurunan ketimpangan, tetapi rata-rata ketimpangannya lebih rendah dari pada Kabupaten Pangandaran dan Ciamis. Hasil yang bisa dilihat pada tabel di atas angkanya mendekati satu artinya wilayah tersebut mengalami ketimpangan yang sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh hasil perhitungan ketimpangan antar wilayah menunjukkan sebagian besar daerah kabupaten mengalami peningkatan angka ketimpangan yang pada akhirnya nilai tersebut memengaruhi nilai ketimpangan wilayah pesisir selatan.

Pada perhitungan Indeks Entropi Theil dapat menghasilkan dua nilai ketimpangan sekaligus, yakni nilai

ketimpangan pembangunan wilayah secara menyeluruh yang terjadi di wilayah pesisir selatan dan nilai ketimpangan pembangunan antar dan dalam wilayah kabupaten yang terjadi di wilayah pesisir selatan Jawa Barat.

Tabel 4 Indeks Entropi Theil
Antar Wilayah Pesisir Selatan Jawa Barat

INDEKS THEIL					
Wilayah Pesisir Selatan	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Kab
Kab. Garut	0,58	0,58	0,57	0,56	0,58
Kab. Sukabumi	0,81	0,82	0,82	0,81	0,81
Kab. Cianjur	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52
Kab. Tasikmalaya	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Kab. Ciamis	1,17	1,17	1,18	1,17	1,17
Kab. Pangandaran	1,87	1,85	1,85	1,86	1,86
Rata-rata	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93

Sumber: Diolah Peneliti

Ketimpangan yang terjadi antar kabupaten di wilayah pesisir selatan Jawa Barat selama periode 2013-2015 relatif berfluktuasi. Nilai ketimpangan yang paling tinggi adalah Kabupaten Pangandaran dengan rata-rata 1,86 dimana Kabupaten Pangandaran ini merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Kabupaten Pangandaran baru dimekarkan pada tahun 2012, menjadi kabupaten yang baru dimekarkan tidak mudah, tetapi bukan berarti dijadikan alasan ketidakmampuan bagi daerah otonom baru untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Analisis Penyusunan Strategi Penurunan Disparitas Pembangunan Pesisir Selatan Jawa Barat

Berdasarkan penyusunan alternatif strategis hasil analisis SWOT, maka dapat disimpulkan bahwa strategis yang dapat dilakukan adalah:

- a. Matriks S-O (*Strengths-Opportunity*).
1. Diperlukan peningkatan

pembangunan infrastruktur berupa jalan bandara, dan pelabuhan untuk mempermudah aksesibilitas arus masuk dan ke luar sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

2. Dengan adanya Rencana Besar Pengembangan Destinasi Wisata Kelas Dunia Provinsi Jawa Barat, maka akan meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga pariwisata akan menjadi salah satu sektor penyumbang terhadap PDRB.
 3. Memanfaatkan keunggulan SDA yang dimiliki pesisir selatan Jawa Barat.
- b. Matriks S-T (*Strength-Threats*) Opportunity.
1. Diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penanggulangan/antisipasi terjadinya bencana tanpa meminimalisir potensi wisata yang ada, misalnya penyediaan teknologi *Tsunami Earling Warning System* (TEWS).
 2. Meningkatkan konsentrasi kegiatan ekonomi pesisir selatan adalah berbasis pertanian perikanan salah satu usaha untuk peningkatan pertanian perikanan adalah dengan cara penebaran benih ikan selain itu pesisir selatan Jawa Barat adalah pariwisata
- c. Matriks W-O (*Weaknesses-Opportunity*).
1. Mendorong penguatan program kemitraan dengan masyarakat lokal untuk peningkatan daya saing masyarakat pesisir selatan Jawa Barat dari sektor ekonomi kreatif berdasarkan referensi dari wilayah lain di Indonesia.
 2. Salah satu penyebab ketimpangan wilayah adalah

alokasi investasi sehingga investasi menjadi salah satu kelemahan, namun diharapkan dengan adanya pembangunan bandara dan pelabuhan akan banyak investor untuk berinvestasi di wilayah pesisir selatan Jawa Barat.

3. Menambah anggaran pariwisata dan infrastruktur melalui bantuan dari provinsi dan pemerintah pusat.

d. *Matriks W-T (Weaknesses-Threats)*.

1. Diberikannya pelatihan kepada unit usaha kecil menengah yang bergerak di bidang pariwisata lokal agar produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk impor. Pelatihan diberikan mulai dari hulu hingga hilir.
2. Meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan potensi wilayah terutama di bidang pariwisata dan pertanian.

Penyusunan strategis di atas dapat digunakan wilayah pesisir selatan Jawa Barat untuk penurunan ketimpangan. Wilayah pesisir selatan Jawa Barat dapat menggunakan strategi dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S-O). Analisis ini diharapkan membuahkan rencana panjang sehingga pembangunan yang terjadi dapat lebih bersifat agresif. Rencana jangka panjang bisa dengan melakukan pembangunan infrastruktur, namun dalam pembangunan tersebut harus tetap memperhatikan kondisi geografis wilayah. Dalam pembangunan bandara dan pelabuhan misalnya harus ditetapkan beberapa standar agar tahan terhadap gempa, tsunami, dan banjir. Selain itu juga pemerintah harus memperhatikan infrastruktur yang kurang dianggap penting misalkan infrastruktur terkait jaringan provider.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengukuran ketimpangan dengan menggunakan Indeks Theil, ketimpangan yang terjadi antar dan dalam wilayah pesisir selatan Jawa Barat sangat tinggi bahkan hampir mendekati 1 yang artinya sangat timpang. Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Ciamis merupakan dua wilayah yang memiliki ketimpangan tinggi dengan angka masing-masing sebesar 1,86 dan 1,17 dan angka tersebut berada di atas rata-rata pesisir selatan Jawa Barat.
2. Strategi yang tepat untuk penurunan disparitas pembangunan wilayah pesisir selatan Jawa Barat adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S-O) yang mana strategi S-O ini yaitu; 1) Diperlukan peningkatan pembangunan infrastruktur berupa jalan bandara, dan pelabuhan untuk mempermudah aksesibilitas arus masuk dan ke luar sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, 2) Dengan adanya Rencana Besar Pengembangan Destinasi Wisata Kelas Dunia Provinsi Jawa Barat, maka akan meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga pariwisata akan menjadi salah satu sektor penyumbang terhadap PDRB, 3) Memanfaatkan keunggulan SDA yang dimiliki pesisir selatan Jawa Barat.

E. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dan menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian di pesisir selatan Jawa barat dengan metode terbaru.
2. Bagi pengambil kebijakan diharapkan dapat mempersiapkan infrastruktur dan suprastruktur untuk mengerjakan strategi agresif yang bersifat jangka panjang yang didukung oleh pihak di wilayah pesisir selatan Jawa Barat.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ardiowati, Dwi, Asnita Frida Sebayang dan Noviani. 2017. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*. Jurnal Prosiding Ilmu Ekonomi ISSN 2460-6553. Volume 3 No 1 Tahun 2017. Universitas Islam Bandung.
- Arsyad, Lincolin. 2015. *Ekonomi Pembangunan*, edisi ke-5, cetakan ke-2. Jogjakarta: . UPP STIM, YKPN.
- Sjafrizal. 2018. *Analisis Ekonomi Regional*, cetakan ke-1. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sjafrizal. 2008. *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Rangkuti, F. 2005. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisns*. Jakarta: Pustaka Jakarta.
- PERATURAN DAERAH JAWA BARAT